

# ANALISIS KUNJUNGAN KERJA DPRD RIAU KE AMERIKA SERIKAT DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Oleh: Ceysha Citra Maharani**

**Pembimbing: Dr. Saiman, S.IP., M.Si**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ke Amerika Serikat merupakan bagian dari diplomasi parlemen yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Melalui kegiatan ini, DPRD Riau berupaya memperoleh pengalaman dan pembelajaran dari praktik tata kelola pendidikan serta kebijakan pembangunan ekonomi di negara maju. Kunjungan tersebut menjadi strategi untuk memperluas jaringan kerja sama internasional dan mendukung peningkatan daya saing daerah di era globalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap arsip, berita, serta laporan resmi. Analisis dilakukan menggunakan teori Liberalisme, level analisis negara, dan teori diplomasi parlemen untuk menjelaskan peran DPRD sebagai aktor diplomasi daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika kunjungan kerja DPRD dalam konteks hubungan internasional dan pembangunan daerah secara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan kerja DPRD Riau memiliki nilai strategis sebagai sarana transfer pengetahuan dan pertukaran kebijakan antar lembaga. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif karena lemahnya mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil kunjungan. Diperlukan sistem pelaporan dan transparansi yang lebih baik agar kunjungan luar negeri menghasilkan kebijakan nyata dalam peningkatan kualitas SDM di Provinsi Riau.

**Kata Kunci:** DPRD Riau, diplomasi parlemen, kunjungan kerja, sumber daya manusia, pembangunan daerah.

## ABSTRACT

*The working visit of the Riau Provincial House of Representatives (DPRD) to the United States is part of parliamentary diplomacy aimed at improving the capacity of council members in the field of human resource development (HR). Through this activity, the Riau DPRD seeks to gain experience and learn from the practices of education governance and economic development policies in developed countries. The visit is a strategy to expand international cooperation networks and support regional competitiveness in the era of globalization.*

*This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation of archives, news, and official reports. The analysis uses liberalism theory, state level analysis, and parliamentary diplomacy theory to explain the role of the DPRD as a regional diplomacy actor. This approach allows researchers to understand the dynamics of DPRD working visits in the context of international relations and regional development in depth.*

*The results show that the Riau DPRD working visits have strategic value as a means of knowledge transfer and policy exchange between institutions. However, the implementation of these activities has not been fully effective due to weak evaluation mechanisms and follow-up on the results of the visits. A better reporting and transparency system is needed so that overseas visits can produce real policies in improving the quality of human resources in Riau Province.*

**Keywords:** Riau DPRD, parliamentary diplomacy, working visits, human resources, regional development.

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat agar tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah dan penyusunan regulasi yang relevan dengan kebutuhan lokal<sup>1</sup>. Keberadaan DPRD menentukan arah pembangunan karena memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, serta fungsi penganggaran<sup>2</sup>. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD menjadi aktor strategis yang berperan dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat<sup>3</sup>. Oleh karena itu, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi juga instrumen utama dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah<sup>4</sup>. Peran DPRD dalam tata kelola daerah menuntut peningkatan kapasitas sumber

daya manusia yang mumpuni agar fungsi legislasi dan pengawasan dapat dijalankan secara efektif. Salah satu upaya peningkatan kapasitas tersebut adalah melalui kunjungan kerja ke luar negeri yang bertujuan memperluas wawasan, mempelajari praktik tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat jejaring kerja sama antar lembaga internasional<sup>5</sup>. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan luar negeri oleh lembaga daerah dimaksudkan untuk memperluas kerja sama internasional dan meningkatkan kompetensi pejabat publik<sup>6</sup>. Kunjungan kerja ini, selain memiliki nilai diplomatik, juga merupakan wujud dari diplomasi parlemen yang melibatkan aktor non-eksekutif dalam hubungan internasional. Melalui kegiatan semacam ini, DPRD dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat diadaptasi dalam konteks pembangunan daerah. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana hasil kunjungan tersebut benar-benar diimplementasikan ke dalam kebijakan publik.

Kunjungan kerja DPRD Provinsi Riau ke Amerika Serikat menjadi contoh konkret pelaksanaan diplomasi parlemen dalam konteks pengembangan sumber daya

---

<sup>1</sup> Siregar, R. (2019). *Peran DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Otonomi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 112–124.

<sup>2</sup> Holqiah, H., Nurhidayati, & Hidayat, A. (2020). *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang*. TheJournalish: Social and Government, 1(2), 60–66.

<sup>3</sup> Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala Pelaksanaan APBD di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8234–8245.

<sup>4</sup> Lay, M. R. (2024). *Strategic Collaboration between Local Government and DPRD in the Implementation of Regional Autonomy*. Journal of Social Research, 3(3), 962–976.

---

<sup>5</sup> Almaina, A., & Sulistyowati, T. (2019). *Peran DPRD dalam Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Lembaga Luar Negeri*. Reformasi Hukum Trisakti, 1(2).

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

manusia daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempelajari sistem pendidikan, kebijakan publik, serta model pengembangan SDM yang diterapkan di Amerika Serikat<sup>7</sup>. Melalui kunjungan ke institusi ternama seperti *New York Institute of Finance* dan *New York University*, DPRD Riau diharapkan dapat memperoleh wawasan baru tentang praktik tata kelola, inovasi pendidikan, dan ekonomi daerah yang dapat diadaptasi di Provinsi Riau<sup>8</sup>. Selain memperluas jaringan kerja sama internasional, kunjungan tersebut juga diharapkan mendorong penguatan kapasitas legislatif dalam perumusan kebijakan berbasis pengetahuan<sup>9</sup>. Namun demikian, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana hasil kunjungan tersebut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan SDM di Riau. Hal ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap keberlanjutan program Pascakunjungan.

Peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan mendesak di Riau, mengingat tingginya angka pengangguran terdidik yang menunjukkan ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 40% pengangguran di Riau berasal dari lulusan pendidikan tinggi<sup>10</sup>. Kondisi ini menandakan perlunya reformasi kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri. Kunjungan kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat menyoroti pentingnya pendidikan vokasi sebagai instrumen utama dalam pengembangan SDM yang produktif dan kompetitif<sup>11</sup>. Amerika Serikat dipilih

karena dianggap memiliki sistem pendidikan vokasi yang maju dan terintegrasi dengan dunia industri, yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan serupa di daerah<sup>12</sup>. Dalam perspektif teori hubungan internasional, kegiatan kunjungan kerja DPRD Riau ke luar negeri dapat dipahami sebagai bentuk *diplomasi parlemen* yang mengedepankan kerja sama lintas negara melalui pendekatan non-tradisional<sup>13</sup>. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antarpellemen dan pertukaran pengetahuan dalam memperkuat hubungan bilateral di luar jalur diplomasi eksekutif formal. Berdasarkan teori liberalisme, kerja sama antarnegara dapat menghasilkan keuntungan bersama melalui saling ketergantungan ekonomi dan sosial (Doyle, 1986)<sup>14</sup>. Oleh karena itu, kunjungan kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat dapat dianggap sebagai upaya *soft diplomacy* untuk memperluas jejaring internasional dan mengakses pengetahuan global guna mendukung kebijakan pembangunan daerah<sup>15</sup>. Dalam kerangka ini, diplomasi parlemen berfungsi bukan hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai wahana peningkatan kapasitas legislatif dan inovasi kebijakan publik. Namun demikian, pelaksanaan kunjungan kerja semacam ini tidak terlepas dari berbagai kritik, terutama terkait efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Kunjungan DPRD Riau ke Amerika Serikat tahun 2022, misalnya, menggunakan anggaran sebesar Rp16,7

<sup>7</sup> RiauOnline. (2023). *DPRD Riau Bakal Kunker ke AS Lagi, Bagaimana Hasil ke Luar Negeri Tahun Lalu?*

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Lay, M. R. (2024).

<sup>10</sup> BPS. (2021). *Laporan Pengangguran di Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>11</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta: Kemendikbud.

<sup>12</sup> Smith, A., & Brown, P. (2020). *Improving Local Competitiveness Through Vocational Education and Training*. *Journal of Regional Development*, 32(1), 34–45.

<sup>13</sup> Paul, T. V. (2021). *Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era*. Yale University Press.

<sup>14</sup> Mearsheimer, J. J. (2019). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press.

<sup>15</sup> Lake, D. A. (2022). *International Order in Realist Theory*. *Annual Review of Political Science*, 25(1), 1–19

miliar dari APBD yang mencakup biaya perjalanan, akomodasi, dan administrasi<sup>16</sup>. Tanpa sistem evaluasi dan pelaporan yang terbuka, kegiatan ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat sebagai bentuk pemborosan dana publik. Oleh karena itu, DPRD perlu memastikan adanya indikator keberhasilan yang jelas serta tindak lanjut nyata dari setiap kunjungan luar negeri<sup>17</sup>. Transparansi hasil kunjungan akan memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah. Evaluasi yang objektif dan terukur diperlukan agar kegiatan tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas SDM dan pembangunan berkelanjutan di Riau.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas kunjungan kerja DPRD Provinsi Riau ke Amerika Serikat dalam peningkatan sumber daya manusia daerah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori liberalisme dan konsep diplomasi parlemen untuk menjelaskan hubungan antara diplomasi legislatif dan kebijakan pembangunan SDM di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman mengenai peran parlemen daerah sebagai aktor diplomatik non-negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat wacana akademik mengenai hubungan internasional tingkat daerah, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif dan adaptif.

## KERANGKA TEORI

### Perspektif: Liberalisme

Perspektif liberalisme merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hubungan internasional yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan

bersama. Menurut Michael W. Doyle, negara-negara liberal memiliki kecenderungan untuk menjalin hubungan yang damai dan kooperatif melalui perdagangan, institusi internasional, dan nilai-nilai demokrasi<sup>18</sup>. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa interdependensi ekonomi dan institusi global dapat mengurangi potensi konflik karena keuntungan dari kerja sama lebih besar daripada konfrontasi<sup>19</sup>. Dalam konteks hubungan internasional, liberalisme memandang bahwa stabilitas global akan lebih mudah tercapai jika negara-negara memilih jalur kolaborasi daripada kompetisi.

Dalam penelitian ini, perspektif liberalisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan kerja sama internasional dapat mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia daerah<sup>20</sup>. Melalui interaksi dengan negara lain, lembaga seperti DPRD Riau berpeluang memperoleh pengetahuan baru yang dapat diadaptasi dalam kebijakan pembangunan. Kunjungan kerja ke Amerika Serikat menjadi wujud konkret dari pendekatan liberal karena didasarkan pada pertukaran gagasan dan praktik terbaik di bidang pendidikan serta pengembangan SDM. Dengan demikian, liberalisme tidak hanya menjelaskan hubungan antarnegara, tetapi juga interaksi lintas lembaga yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan liberalisme juga menekankan pentingnya lembaga internasional dan jejaring antaraktor dalam membangun sistem kerja sama yang saling

---

<sup>16</sup> APBD Provinsi Riau Tahun 2022.

<sup>17</sup> . RiauOnline,

---

<sup>18</sup> Doyle, M. W. (1986). *Liberalism and World Politics*. American Political Science Review, 80(4), 1151–1169.

<sup>19</sup> Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1989). *Power and Interdependence*. Boston: Little, Brown.

<sup>20</sup> Mearsheimer, J. J. (2019). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press.

menguntungkan<sup>21</sup>. Dalam konteks ini, DPRD sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah dapat berperan aktif dalam menginisiasi diplomasi non-tradisional melalui jalur parlemen. Interaksi yang dilakukan dalam kunjungan kerja ke luar negeri mencerminkan esensi liberalisme, yakni saling belajar dan berbagi pengalaman untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan kerangka ini, hubungan internasional dipahami bukan hanya antarnegara, tetapi juga melibatkan aktor subnasional seperti parlemen daerah yang berperan dalam diplomasi pembangunan.

#### **Level Analisis: Negara**

Level analisis negara digunakan untuk memahami perilaku negara atau entitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional<sup>22</sup>. Pendekatan ini melihat negara sebagai aktor utama dan unit analisis yang bertindak secara rasional untuk mencapai kepentingan nasional, seperti keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hubungan internasional, negara dipandang sebagai entitas tunggal (*unitary actor*) yang memiliki tujuan dan kepentingan yang jelas dalam setiap kebijakannya<sup>23</sup>.

Dalam penelitian ini, level analisis negara digunakan untuk menjelaskan posisi Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD sebagai representasi daerah yang menjalankan fungsi diplomatik<sup>24</sup>. Kunjungan kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat mencerminkan upaya pemerintah

daerah dalam memperkuat kapasitas SDM sebagai bagian dari kepentingan pembangunan daerah. Meskipun DPRD bukan aktor negara dalam arti formal, perannya sebagai lembaga publik yang sah secara konstitusional menjadikannya bagian dari mekanisme representasi politik negara. Dengan demikian, aktivitas diplomasi parlemen yang dilakukan DPRD dapat dipahami dalam kerangka perilaku negara yang ingin memperluas kerja sama internasional untuk mencapai tujuan domestik.

Pendekatan ini juga membantu menafsirkan kunjungan kerja DPRD dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan daerah<sup>25</sup>. Keputusan untuk melakukan studi banding ke luar negeri bukan semata-mata keputusan administratif, tetapi bagian dari strategi politik daerah untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia. Level analisis negara memudahkan identifikasi motif, kepentingan, serta implikasi kebijakan yang muncul dari aktivitas internasional DPRD. Oleh karena itu, teori ini relevan dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan luar negeri daerah dan peningkatan kapasitas internal melalui kolaborasi global.

#### **Teori: Diplomasi Parlemen**

Teori diplomasi parlemen menjelaskan peran lembaga legislatif dalam menjalin hubungan internasional melalui mekanisme non-eksekutif<sup>26</sup>. Diplomasi ini berbeda dari diplomasi tradisional karena tidak dijalankan oleh kepala negara atau kementerian luar negeri, melainkan oleh wakil rakyat di lembaga legislatif. Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting dalam memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral di tingkat

---

<sup>21</sup> Lake, D. A. (2022). *International Order in Realist Theory*. Annual Review of Political Science, 25(1), 1–19.

<sup>22</sup> Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.

<sup>23</sup> Wendt, A. (1992). *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. International Organization, 46(2), 391–425.

<sup>24</sup> Lay, M. R. (2024). *Strategic Collaboration Between Local Government and DPRD in The Implementation of Regional Autonomy*. Journal of Social Research, 3(3), 962–976.

---

<sup>25</sup> BPS. (2021). *Laporan Pengangguran di Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>26</sup> Stavridis, S. (2002). *Parliamentary Diplomacy: Some Preliminary Findings*. The Hague Journal of Diplomacy, 1(2), 93–108.



global<sup>27</sup>. Melalui kegiatan seperti kunjungan kerja, forum antarpemerintah, dan pertukaran kebijakan, parlemen dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan politik luar negeri negara.

Dalam konteks penelitian ini, diplomasi parlemen digunakan untuk memahami peran DPRD Riau dalam membangun kerja sama internasional melalui kunjungan kerja ke Amerika Serikat<sup>28</sup>. Aktivitas ini bukan hanya sekadar perjalanan dinas, tetapi juga bentuk komunikasi politik yang bertujuan memperluas jejaring antar lembaga internasional dan memperkuat kapasitas internal daerah. Diplomasi parlemen memungkinkan anggota DPRD untuk berinteraksi langsung dengan institusi asing guna mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang relevan bagi pengembangan kebijakan lokal. Melalui pendekatan ini, DPRD dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat lokal dan komunitas global.

Diplomasi parlemen juga menekankan nilai keterbukaan, dialog, dan pertukaran informasi dalam memperkuat hubungan internasional<sup>29</sup>. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, DPRD Riau berupaya menjadikan kunjungan luar negeri sebagai sarana strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kualitas SDM dan penguatan daya saing daerah di tingkat global. Dengan demikian, teori diplomasi parlemen relevan digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan DPRD Riau berkontribusi terhadap penguatan kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>27</sup> Rietig, K. (2016). *The Importance of Parliamentary Diplomacy in Modern Governance*. *Global Policy*, 7(4), 522–531.

<sup>28</sup> RiauOnline. (2023). *DPRD Riau Bakal Kunker ke AS Lagi, Bagaimana Hasil ke Luar Negeri Tahun Lalu?*

<sup>29</sup> Paul, T. V. (2021). *Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era*. Yale University Press

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam makna dan implikasi dari kunjungan kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat dalam konteks peningkatan sumber daya manusia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap arsip, laporan resmi, berita, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menekankan interpretasi terhadap proses dan hasil kegiatan diplomasi parlemen. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antara aktivitas politik luar negeri daerah dan kebijakan pengembangan SDM secara kontekstual. Hasil analisis selanjutnya dihubungkan dengan kerangka teori Liberalisme, level analisis negara, dan teori diplomasi parlemen untuk menjelaskan peran DPRD sebagai aktor diplomasi dalam pembangunan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan dan Kontekstualisasi Kunjungan Kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat**

Kunjungan kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat dilatarbelakangi oleh upaya lembaga legislatif dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memperluas wawasan kebijakan publik<sup>30</sup>. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi dalam konteks otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>31</sup>. Melalui studi banding ke institusi pendidikan dan pemerintahan di Amerika Serikat, DPRD Riau berupaya mengidentifikasi praktik terbaik dalam

---

<sup>30</sup> Siregar, R. (2019). *Peran DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Otonomi*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 112–124.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pengembangan SDM yang dapat diadaptasi di tingkat daerah<sup>32</sup>. Kunjungan ini juga mencerminkan penerapan prinsip diplomasi parlemen sebagai bentuk kerja sama internasional non-eksekutif antar lembaga publik<sup>33</sup>

Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD 2019–2024 menetapkan peningkatan SDM sebagai prioritas strategis guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing<sup>34</sup>. Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran penting dalam memfasilitasi kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi<sup>35</sup>. Melalui kunjungan kerja ke luar negeri, DPRD Riau mengkaji sistem pendidikan vokasi di Amerika Serikat sebagai model pembelajaran berbasis kompetensi kerja<sup>36</sup>. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah yang menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja industri lokal dan global<sup>37</sup>.

<sup>32</sup> Lay, M. R. (2024). *Strategic Collaboration Between Local Government and DPRD in The Implementation of Regional Autonomy*. *Journal of Social Research*, 3(3), 962–976.

<sup>33</sup> Almaina, A., & Sulistyowati, T. (2019). *Peran DPRD dalam Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Lembaga Luar Negeri*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2).

<sup>34</sup> Pemerintah Provinsi Riau. (2020). *RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024*. Pekanbaru: Bappeda.

<sup>35</sup> Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala Pelaksanaan APBD di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245.

<sup>36</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta: Kemendikbud

<sup>37</sup> Smith, A., & Brown, P. (2020). *Improving Local Competitiveness Through Vocational Education and Training*. *Journal of Regional Development*, 32(1), 34–45.

**Tabel 2.1 Perbandingan Indikator Ketenagakerjaan dan Pendidikan Vokasi di Provinsi Riau, Indonesia, dan Amerika Serikat)**

| Indikator                                  | Provinsi Riau | Indonesia (Rata-rata) | Amerika Serikat |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Tingkat Pengangguran                       | 7,07%         | 7,07%                 | 5,4%            |
| Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi      | 40%           | 30%                   | 22%             |
| Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi per Tahun | 12.000 orang  | 3.000.000 orang       | 6.000.000 orang |
| Tingkat Pekerjaan di Sektor Industri       | 15%           | 20%                   | 25%             |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>56</sup>, 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020<sup>57</sup>, Bureau of Labor Statistics USA, 2021.<sup>58</sup>

Perbandingan indikator pada tabel di atas menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kualitas pendidikan vokasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja di Riau dibandingkan dengan Amerika Serikat<sup>38</sup>. Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri daerah<sup>39</sup>. Oleh karena itu, hasil kunjungan kerja DPRD Riau menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan penguatan SDM berbasis inovasi dan kolaborasi internasional<sup>40</sup>. Dengan implementasi

<sup>38</sup> BPS. (2021). *Laporan Pengangguran di Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>39</sup> RiauOnline. (2023). *DPRD Riau Bakal Kunker ke AS Lagi, Bagaimana Hasil ke Luar Negeri Tahun Lalu?*

<sup>40</sup> Fatimah Zahrah Br Surbakt. (2016). *Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai*

kebijakan yang berkesinambungan, diharapkan kegiatan diplomasi parlemen semacam ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas SDM di Provinsi Riau<sup>41</sup>.

### **Diplomasi Parlemen dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Kunjungan Internasional**

Diplomasi parlemen merupakan bentuk diplomasi non-tradisional yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam menjalin hubungan internasional melalui jalur non-eksekutif<sup>42</sup>. Dalam konteks hubungan internasional modern, diplomasi parlemen berfungsi memperkuat kerja sama antar lembaga legislatif di berbagai negara dalam isu-isu pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan publik<sup>43</sup>. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran strategis dalam menerapkan prinsip diplomasi parlemen melalui kegiatan seperti kunjungan kerja ke luar negeri<sup>44</sup>. Kunjungan DPRD Riau ke Amerika Serikat menjadi contoh konkret praktik diplomasi parlemen daerah yang bertujuan memperluas pengetahuan dan membangun jejaring internasional dalam bidang pengembangan SDM<sup>45</sup>.

Dalam pelaksanaannya, diplomasi parlemen yang dijalankan DPRD Riau berfokus pada peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan dari lembaga mitra di luar negeri<sup>46</sup>. Melalui kunjungan ke

institusi pendidikan dan pelatihan di Amerika Serikat, anggota DPRD memperoleh informasi mengenai sistem pendidikan vokasi, manajemen keuangan publik, serta inovasi kebijakan berbasis riset<sup>47</sup>. Proses ini mencerminkan pendekatan liberal dalam hubungan internasional yang menekankan kerja sama lintas aktor untuk mencapai kepentingan bersama<sup>48</sup>. Kegiatan diplomasi parlemen tersebut juga berfungsi sebagai sarana *soft power* daerah dalam menjalin hubungan internasional yang produktif dan saling menguntungkan<sup>49</sup>.

Hasil diplomasi parlemen DPRD Riau memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan wawasan kebijakan dan perumusan program kerja daerah.<sup>50</sup> Pengetahuan yang diperoleh melalui kunjungan internasional dapat menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pengembangan SDM di Provinsi Riau<sup>51</sup>. Selain itu, kegiatan ini memperkuat posisi DPRD sebagai aktor politik yang mampu menjalankan peran diplomatik sekaligus legislasi secara sinergis<sup>52</sup>. Namun, agar diplomasi parlemen memberikan dampak nyata, diperlukan mekanisme evaluasi dan

---

Upaya Peningkatan Pembangunan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 218.

<sup>41</sup> Lay, M. R. (2024).

<sup>42</sup> Stavridis, S. (2002). *Parliamentary Diplomacy: Some Preliminary Findings*. *The Hague Journal of Diplomacy*, 1(2), 93–108.

<sup>43</sup> Rietig, K. (2016). *The Importance of Parliamentary Diplomacy in Modern Governance*. *Global Policy*, 7(4), 522–531.

<sup>44</sup> Almaina, A., & Sulistyowati, T. (2019). *Peran DPRD dalam Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Lembaga Luar Negeri*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2).

<sup>45</sup> RiauOnline. (2023). *DPRD Riau Bakal Kunker ke AS Lagi, Bagaimana Hasil ke Luar Negeri Tahun Lalu?*

<sup>46</sup> Lay, M. R. (2024). *Strategic Collaboration Between Local Government and DPRD in The*

---

*Implementation of Regional Autonomy*. *Journal of Social Research*, 3(3), 962–976.

<sup>47</sup> Smith, A., & Brown, P. (2020). *Improving Local Competitiveness Through Vocational Education and Training*. *Journal of Regional Development*, 32(1), 34–45.

<sup>48</sup> Doyle, M. W. (1986). *Liberalism and World Politics*. *American Political Science Review*, 80(4), 1151–1169.

<sup>49</sup> Paul, T. V. (2021). *Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era*. Yale University Press.

<sup>50</sup> Mearsheimer, J. J. (2019). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press.

<sup>51</sup> Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala Pelaksanaan APBD di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245.

<sup>52</sup> Lay, M. R. (2024).



tindak lanjut hasil kunjungan yang terukur dan transparan<sup>53</sup>.

### **Evaluasi Dampak Kebijakan dan Kunjungan Kerja DPRD Riau dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai strategis dalam memperluas wawasan legislatif, namun belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap kebijakan pengembangan SDM daerah<sup>54</sup>. Kunjungan ini dinilai berhasil meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota dewan dalam memahami praktik tata kelola pendidikan dan ekonomi di negara maju<sup>55</sup>. Namun demikian, hasil studi banding belum terintegrasi optimal dalam program kebijakan daerah karena kurangnya mekanisme tindak lanjut pasca kunjungan<sup>56</sup>. Hal ini memperlihatkan perlunya sistem evaluasi dan pelaporan hasil kunker yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada implementasi kebijakan pembangunan daerah<sup>57</sup>.

Dari sisi kebijakan anggaran, perjalanan dinas DPRD Riau ke luar negeri

memerlukan justifikasi yang jelas mengingat besarnya alokasi dana publik yang digunakan<sup>58</sup>. Berdasarkan data APBD Provinsi Riau tahun 2022, anggaran kunjungan kerja luar negeri mencapai sekitar Rp16,7 miliar<sup>59</sup>. Pengeluaran tersebut menimbulkan kritik dari masyarakat karena belum terlihat hasil konkret yang dapat dirasakan secara langsung oleh publik<sup>60</sup>. Oleh sebab itu, prinsip efisiensi dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam perencanaan kunjungan luar negeri agar selaras dengan prinsip *good governance*<sup>61</sup>.

Dalam perspektif pembangunan daerah, kunjungan kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai sarana diplomasi pembangunan berbasis pertukaran pengetahuan<sup>62</sup>. Pengalaman dan informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja di Provinsi Riau<sup>63</sup>. Namun, agar potensi tersebut benar-benar terwujud, DPRD perlu mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor industri untuk menindaklanjuti hasil kunjungan<sup>64</sup>. Dengan adanya sinergi antar lembaga, kegiatan diplomasi parlemen dapat bertransformasi menjadi instrumen efektif dalam mendukung peningkatan kualitas

---

<sup>53</sup> Fatimah Zahrah Br Surbakti. (2016). *Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan*. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 218.

<sup>54</sup> Lay, M. R. (2024). *Strategic Collaboration Between Local Government and DPRD in The Implementation of Regional Autonomy*. *Journal of Social Research*, 3(3), 962–976.

<sup>55</sup> RiauOnline. (2023). *DPRD Riau Bakal Kunker ke AS Lagi, Bagaimana Hasil ke Luar Negeri Tahun Lalu?*

<sup>56</sup> Fatimah Zahrah Br Surbakti. (2016). *Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan*. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 218.

<sup>57</sup> Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala Pelaksanaan APBD di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245.

---

<sup>58</sup> APBD Provinsi Riau Tahun 2022

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> RiauOnline,

<sup>61</sup> Siregar, R. (2019). *Peran DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Otonomi*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 112–124.

<sup>62</sup> Almaina, A., & Sulistyowati, T. (2019). *Peran DPRD dalam Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Lembaga Luar Negeri*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2).

<sup>63</sup> Smith, A., & Brown, P. (2020). *Improving Local Competitiveness Through Vocational Education and Training*. *Journal of Regional Development*, 32(1), 34–45.

<sup>64</sup> Pemerintah Provinsi Riau. (2020). *RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024*. Pekanbaru: Bappeda.

SDM serta daya saing daerah di tingkat nasional maupun global<sup>65</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kunjungan kerja DPRD Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berbasis pada peningkatan sumber daya manusia. Kunjungan internasional ke Amerika Serikat dan Kroasia memperlihatkan bahwa diplomasi parlemen yang dilakukan DPRD tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dilandasi oleh kebutuhan mendesak daerah untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terdidik, lemahnya pendidikan vokasi, dan rendahnya serapan tenaga kerja oleh industri. Melalui diskusi dengan institusi luar negeri seperti New York Institute of Finance dan New York University, DPRD memperoleh wawasan baru mengenai tata kelola pendidikan, manajemen keuangan publik, serta pengembangan UMKM yang dapat diadaptasi di Riau. Dengan demikian, peran kunjungan kerja DPRD lebih tepat dipahami sebagai sarana diplomasi parlemen yang memperkuat kapasitas kebijakan daerah sekaligus menghubungkan kebutuhan lokal dengan dinamika global. Implikasi strategis dari peran tersebut adalah meningkatnya potensi daya saing daerah melalui akses terhadap pengetahuan, jejaring internasional, dan peluang investasi. DPRD Riau berkontribusi pada pembangunan daerah dengan membawa pulang praktik terbaik yang relevan untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sektor ekonomi lokal, sehingga mendukung penciptaan SDM yang lebih kompetitif. Selain itu, kunjungan ini juga selaras dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024, khususnya prioritas

peningkatan kualitas SDM dan penguatan UMKM. Dengan menjalankan diplomasi parlemen, DPRD berperan sebagai kanal diplomasi alternatif yang memperluas saluran komunikasi kepentingan Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, efektivitas peran kunjungan kerja DPRD terletak pada kemampuannya menghubungkan tantangan pembangunan daerah dengan solusi internasional, sehingga mendukung perencanaan pembangunan berbasis SDM yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah sekaligus memperkuat kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1989). *Power and Interdependence*. Boston: Little, Brown.
- Mearsheimer, J. J. (2019). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. New Haven: Yale University Press.
- Paul, T. V. (2021). *Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era*. New Haven: Yale University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Lake, D. A. (2022). "International Order in Realist Theory." *Annual Review of Political Science*, 25(1), 1–19.
- Wendt, A. (1992). "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics." *International Organization*, 46(2), 391–425.

### JURNAL

- Siregar, R. (2019). "Peran DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Otonomi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 112–124.
- Holqiah, H., Nurhidayati, & Hidayat, A. (2020). "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota

---

<sup>65</sup> Mearsheimer, J. J. (2019). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press.

- Palembang.” *TheJournalish: Social and Government*, 1(2), 60–66.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). “Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala Pelaksanaan APBD di Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245.
- Lay, M. R. (2024). “Strategic Collaboration between Local Government and DPRD in the Implementation of Regional Autonomy.” *Journal of Social Research*, 3(3), 962–976.
- Almaina, A., & Sulistyowati, T. (2019). “Peran DPRD dalam Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Lembaga Luar Negeri.” *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2).
- Smith, A., & Brown, P. (2020). “Improving Local Competitiveness Through Vocational Education and Training.” *Journal of Regional Development*, 32(1), 34–45.
- Doyle, M. W. (1986). “Liberalism and World Politics.” *American Political Science Review*, 80(4), 1151–1169.
- Stavridis, S. (2002). “Parliamentary Diplomacy: Some Preliminary Findings.” *The Hague Journal of Diplomacy*, 1(2), 93–108.
- Rietig, K. (2016). “The Importance of Parliamentary Diplomacy in Modern Governance.” *Global Policy*, 7(4), 522–531.
- Fatimah Zahrah Br Surbakt. (2016). “Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan.” *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 218.

#### **BERITA**

- RiauOnline. (2023). *DPRD Riau Bakal Kunker ke AS Lagi, Bagaimana Hasil ke Luar Negeri Tahun Lalu?*
- RiauOnline. (2022). *Kunjungan Kerja DPRD Riau ke Amerika Serikat Habiskan Anggaran Rp16,7 Miliar.*

- Kompas. (2021). *Evaluasi Perjalanan Dinas DPRD dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Daerah.*

#### **WEBSITE**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Laporan Pengangguran di Indonesia 2021.*  
Diakses dari: <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2020). *Statistik Pendidikan 2020.*  
Diakses dari: <https://www.kemdikbud.go.id>